

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN MUSAYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) I KOTA BANDUNG

Merdi Hajiji¹, Bambang Rudiansah²

Universitas Langlangbuana, Bandung
merdihajiji6672@gmail.com¹, rudiansahb79@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Bandung merupakan aspek krusial dalam perencanaan pemerintah daerah, namun pembangunan yang dilakukan selama ini cenderung terpusat dan didominasi oleh pemerintah daerah dengan sedikit kontribusi dari masyarakat. Maka dalam hal ini, *collaborative governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan diyakini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *collaborative governance* dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung, seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan hasil jangka pendek, hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat terkait program kerja pemerintah daerah yang pada akhirnya memberikan pernyataan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Bandung belum optimal sehingga diperlukan pendekatan lain selain *collaborative governance* untuk partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dimana data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci: Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Tata Kelola Kolaboratif

ABSTRACT

This research aims to find out how development planning deliberation in Bandung City is a crucial aspect in local government planning, but the development carried out so far tends to be centralised and dominated by the local government with little contribution from the community. So in this case, collaborative governance in development planning deliberations is believed to be able to improve the quality of development planning oriented towards regional progress and community welfare. This research aims to examine collaborative governance in the implementation of development planning deliberations and the factors that influence collaborative governance in development planning in Bandung City, such as face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding and short-term results, this is needed to determine the extent of community participation related to local government work programs which ultimately provides a statement that development planning deliberations in

Bandung City are not optimal so that other approaches besides collaborative governance are needed for community participation. In addition, this research uses a descriptive qualitative research design where research data is obtained through observation, interviews and documentation.

Keywords: *Development Planning Deliberation; Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi lokal berdasarkan integritas, luas dan tanggung jawab adalah pilihan sistem pemerintah saat ini. Pengembangan dan penguatan komunitas yang dilakukan oleh pemerintah di setiap sudut wilayah adalah buah dari kebutuhan akan reformasi. Prinsip-prinsip desentralisasi di pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memberikan kemungkinan dan kebebasan bagi daerah Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang menggunakan kemungkinan yang tepat. Dalam hal ini, pemerintah mensyaratkan proses untuk merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat ketika berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah pedoman yang akan direncanakan.

Kehadiran Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 bertujuan untuk mempercepat sumbu masyarakat dengan meningkatkan layanan, partisipasi pemerintah daerah dan daya saing lokal. Hal ini dilakukan dengan mengamati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan orisinalitas di wilayah tersebut sebagai bagian dari negara persatuan di Republik Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah harus ditingkatkan dengan mempertimbangkan hubungan antara pusat dan wilayah dan tantangan global. Di bawah hukum, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan rencana pembangunan untuk pengumpulan rencana pembangunan.

Bandung sebagai kota metropolitan dan ibukota Provinsi Jawa Barat, memiliki peran penting sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung (Bandung Basin Metropolitan), yang merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Alasan disebut sebagai kota terbesar kedua dalam kategori metropolitan adalah karena jaringan transportasi utama di Kota Bandung terhubung melalui Jalan Tol Purbaleunyi dan Kereta Api Argo Parahyangan, sehingga memudahkan mobilitas antar wilayah Bandung.

Menurut data statistik BPS Kota Bandung tahun 2024, berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.506.203 jiwa, meliputi jumlah penduduk perempuan 1.247.367 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 1.259.236 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 2.484,15 jiwa, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kota Bandung selama 1 tahun atau lebih.

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,92%. Sedangkan rasio penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 sebesar 101,0.

Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Musrenbang 2025 untuk partisipasi masyarakat. Musrenbang diharapkan menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mempengaruhi APBD Kota Bandung 2026. Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah aspirasi masyarakat benar-benar akan terwujud dalam APBD? Jika Musrenbang hanya menjadi rutinitas formalitas, maka efektivitas dan dampaknya patut dipertanyakan. Harapannya, Musrenbang dapat menjadi lebih dari sekadar formalitas dan benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat Kota Bandung.

Untuk mencapai Tujuan Pengembangan Implementasi dari Konferensi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kolaborasi antara aktor harus diterapkan untuk menciptakan inovasi yang berfokus pada produktivitas, perubahan teknologi, peran pengetahuan, dan peran kontribusi aktor. Inovasi lokal diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan layanan publik. Inovasi pemerintah daerah dapat dicapai ketika keputusan politik dan implementasi berdampak ketika mitra organisasi pemerintah terlibat. Menurut TI (Ansesell & Slice, n.d.-a), pemangku kepentingan organisasi non-pemerintah bertanggung jawab atas hasil politik melalui partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan kerja sama regional dalam mendukung rencana pembangunan, terutama dengan hasil Musrenbang di Kota Bandung.

Perencanaan di ranah publik seringkali kompleks karena melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan solusi atau mengambil keputusan. Kegagalan pasar dan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik juga menjadi tantangan. Partisipasi publik dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pemerintah dan meningkatkan efektivitas perencanaan. Namun, efektivitas partisipasi publik juga tergantung pada bagaimana proses tersebut dilaksanakan dan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menurut (Ansell & Gash, n.d.-a) Collaborative governance adalah pengaturan tata kelola di mana badan publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik.

Dalam hal ini kolaborasi adalah kunci keberhasilan pemerintah saat ini dan di masa depan. Collaborative governance merupakan hasil pengembangan atau bentuk operasional dari konsep good governance yang menjelaskan bagaimana proses keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama oleh setiap individu, kelompok, dan organisasi dalam bentuk hasil yang bermakna dan berkelanjutan. (Emerson et al., n.d.)

Menurut (Febrian, 2016), Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah pendekatan dalam pemerintahan kolaboratif. Ini berarti pemerintah tidak sendirian dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keikutsertaan pemangku kepentingan penting untuk menciptakan kondisi yang terukur dan saling kontrol. Kesadaran untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju. Rasa memiliki wilayah oleh masyarakat akan meringankan semua pihak.

Konsep collaborative governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung, Pemerintah sendiri termotivasi oleh kondisi bahwa ia tidak dapat mengandalkan kemampuan internalnya, baik dalam perumusan pedoman maupun dalam menerapkan kebijakan. Keterampilan, sumber daya, dan jaringan yang terbatas yang mendukung implementasi program dan politik mendorong pemerintah untuk bekerja dengan partai politik yang berbeda, partai swasta, komunitas dan masyarakat, sehingga kerja sama bertekad untuk mencapai program atau tujuan politik (Purwanti, 2016). Mempelajari tata kelola bersama dalam perencanaan pembangunan regional adalah studi penting yang berkontribusi baik secara akademis dan praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki konsep penelitian kualitatif deskriptif. Alasan: penelitian ini lebih berfokus pada deskripsi fenomena yang diamati dan tidak terlalu banyak melakukan perhitungan dengan metode statistik. Penelitian ini menggunakan model tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2007) yang terdiri dari: kondisi awal; desain kelembagaan; kepemimpinan fasilitatif; dan proses kolaboratif. Dimensi collaborative process dapat menggambarkan perspektif implementasi collaborative governance dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Jenis data yang diperlukan untuk mendukung studi ini adalah data utama dan data sekunder. Data utama mencakup informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung, seperti rekaman audio, rekaman video, dan foto yang diambil oleh para peneliti. Foto telah dikumpulkan untuk menampilkan kondisi saat ini untuk proses perencanaan pengembangan kota Bandung. Data primer juga diperoleh dalam wawancara mendalam dengan informasi penelitian. Sementara itu, data sekunder dari sumber lain disimpan sebagai sumber asli (baik sumber manusia dan kelembagaan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung**

a. *Dialogue Face to Face*

Dialog tatap muka terjadi antara partner yang terlibat, seperti Pemerintah Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, dan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung berperan dalam menyusun musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Mereka melakukan pertukaran informasi secara vertikal dengan semua perangkat dan walikota. DPRD Kota Bandung juga terlibat dalam pertukaran informasi dengan pemerintah untuk membangun komunikasi dan menyatukan visi dalam perencanaan tersebut.

Musrenbang di Kota Bandung perlu memperhatikan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi panduan pembangunan di pusat dan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan daerah harus sesuai rencana nasional untuk mencapai tujuan yang sama. Observasi dan data wawancara menunjukkan bahwa dialog antara stakeholder berjalan baik. Musyawarah perencanaan memerlukan kesepakatan dari semua pihak, untuk memperkuat kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ini sesuai dengan pandangan (Ansell & Cut, 2007) dan berkolaborasi untuk membawa komunikasi ke salah satu proses inti. Mereka menjelaskan dalam bentuk discourse wajah. Komunikasi dalam hal ini adalah kelanjutan dari nilai-nilai dasar kepemimpinan kolektif. Komunikasi adalah subsistem implementasi politik. Diperlukan kolaboratif dan multi-komunikasi. Multicommunication adalah umpan balik yang disampaikan secara berkelanjutan oleh dua pihak atau lebih. Respons dan jawaban akan dipenuhi untuk semua pihak dalam berbagai opsi komunikasi (lisan atau tertulis). Tata kelola kolaborasi yang perfect mencakup setidaknya tiga partai. Mereka memiliki perwakilan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Komunikasi langsung. Komunikasi melalui media hanya dilakukan untuk komunikasi yang intensif. Kehadiran interaksi langsung dapat memberikan penguatan untuk nilai-nilai vital lainnya. Pada akhirnya, memperkuat praktik kerja sama. Secara umum, informan mempertimbangkan perlunya berpartisipasi dalam rencana pengembangan untuk manfaat positif. Namun, beberapa orang berasumsi bahwa ini tentu saja mempengaruhi mekanisme dan waktu perencanaan pembangunan daerah. Jika masyarakat terlibat, diperlukan perjanjian khusus.

b. Trust Building

Para ahli mengatakan kepercayaan pada organisasi adalah komponen kunci dalam membangun komunikasi, memberikan keberhasilan yang aman dalam memperlakukan pekerjaan dengan tim kerja, manajer dan karyawan yang konsisten, meminimalkan risiko, mengurangi biaya, dan mempromosikan partisipasi dan produktivitas karyawan. Dengan demikian, dalam keadaan tertentu, tingkat Kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan komitmen kelompok dan mengurangi dampak di luar organisasi. Kurangnya kepercayaan

antar pemangku kepentingan menjadi perhatian dalam tata kelola. Literatur menyoroti negosiasi dan upaya membangun kepercayaan. (Imperial, 2005).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada situasi konflik antara aktor, dan bahwa seringkali rumit untuk membangun kepercayaan. Hasil studinya juga menunjukkan bahwa struktur kepercayaan sering kali merupakan aspek utama perhatian dalam kerja sama, dan bahwa ada kecenderungan bagi mereka untuk menjadi sangat sulit untuk bekerja sama dan melaksanakan perilaku negatif orang-orang yang tidak percaya.

Perhatikan peran masing-masing mitra dalam proses Nasihat Perencanaan Pembangunan Kota Bandung (Musembang). Ini menunjukkan bahwa kerja sama didasarkan pada kerja sama dan rasa saling percaya. Mitra melakukan peran mereka sesuai dengan tugas yang ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Di dalamnya ada ledakan bapel, dan ada kepercayaan di antara sesama manusia. DPRD bekerja dan kepercayaan dengan DPR lain, baik di komite maupun di kedua organisasi keluarga DPRD. Demikian pula, eksternal antara Bappelitbang dan DPRD harus bekerja sama.

Terkait membangun kepercayaan, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh (Karlsen et al., 2008) Struktur kepercayaan dengan semua mitra ini dalam menerapkan kegiatan dapat ditingkatkan melalui strategi komunikasi, tanggung jawab dan integritas, tugas dan integritas, akuntabilitas dan kompetensi, keandalan dan pengaturan integritas dan tindakan, dan upaya membangun kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditunjuk bersama.

Hal-hal dasar yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi Konferensi Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbang) adalah untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dengan secara aktif mengambil tindakan dalam proses pengembangan regional dari rencana pembangunan, dengan secara aktif memastikan kepercayaan, baik internal maupun eksternal, dan dengan meningkatkan komunikasi.

c. *Commitment to Process*

Keberhasilan sebuah usaha kuncinya pada komitmen sama halnya dengan kerja sama kolaboratif yang mana melibatkan aktor dari berbagai pihak yang memiliki perbedaan *background*, arah pandangan, pengalaman oleh karena itu, komitmen bersama merupakan titik vital dalam hal kerja sama. Masing-masing aktor harus mempunyai komitmen bersama membangun komitmen bersama yaitu dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah yang bertujuan memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Komitmen terhadap proses (komitmen terhadap metode) umumnya terkait dengan motivasi individu untuk secara aktif berpartisipasi dalam implementasi tata kelola bersama (manajemen bersama). Dalam hal ini, Individu terlibat karena tidak ingin proposal mereka diabaikan. Komitmen terhadap proses berarti membangun kerja sama

antara semua pihak untuk mencapai hasil sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan pentingnya motivasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola kolaborasi di organisasi koperasi.

Berdasarkan keterangan berbagai informan yang diwawancarai, para informan mengharapkan bahwa dalam dimensi komitmen pada proses dapat berjalan dengan baik dengan tercapainya penghargaan terhadap kebebasan individu, membangun rasa kepemilikan bersama, dan adanya keterbukaan dalam mencapai keberhasilan bersama. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai *stakeholder* dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan harus dapat menunjukkan sinergitas dengan DPRD di dalam perencanaan pembangunan daerah, serta adanya interaksi yang intensif antara seluruh aktor yang terlibat dengan masyarakat, sehingga apabila masyarakat melihat adanya sinergitas, maka masyarakat akan timbul kepercayaan, dukungan dan partisipasi aktif, baik dalam menyampaikan masukan maupun dalam pengawasan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh (Thomson & Perry, 2006), Kolaborasi ini adalah proses interaktif antara organisasi yang melibatkan negosiasi komitmen, mengembangkan dan menilai mereka, dan menerapkan keterlibatan bersama. Organisasi berkewajiban untuk bernegosiasi, mengembangkan, dan mengevaluasi kewajiban mereka berdasarkan kepentingan kaki tangan mereka dan Kebutuhan kolektif organisasi penting. Menolak kolaborasi dapat menyebabkan ambiguitas, dinamika, dan kompleksitas masalah yang sulit diselesaikan. Kolaborasi adalah proses interaktif antara organisasi dan kewajiban yang disepakati. (Thomson & Perry, 2006).

d. *Shared to Understanding*

Pemahaman umum adalah kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dan diperlukan untuk pemecahan masalah. Studi ini memberikan aspek pemahaman umum. Hal tersebut sejalan pula dengan hasil observasi yang memberikan gambaran bahwa proses perencanaan pembangunan daerah secara terstruktur telah dilakukan dengan tidak melewatkan proses konsultasi dan musyawarah sehingga dapat menjamin kejelasan penjabaran misi dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan. Dalam penjabaran misi harus mempunyai tujuan yang jelas agar penjabaran misi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman para aktor dalam Musrenbang di Kota Bandung bervariasi. Namun, semua aktor berusaha menyamakan pemahaman bahwa Musrenbang penting untuk pemerintahan dan pelayanan publik. Pemahaman umum tentang proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Bandung sangat diperlukan sebagai aspek dan sebagai dimensi kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan ulasan dokumen, dapat ditentukan bahwa pemahaman umum Kota Perencanaan Pembangunan Musrenbang (Musrenbang) pada dasarnya menentukan. Kesamaan persepsi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat penting agar semua pihak terlibat aktif dalam Musrenbang di Kota Bandung. Secara umum, kegagalan

pedoman adalah karena selama persiapan dan selama implementasi kurangnya pemahaman yang sama antara semua yang terlibat, atau karena kurangnya pemahaman umum di tingkat lokal bahwa pemerintah daerah tidak dapat menciptakan kondisi dan pemahaman umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mempromosikan pemahaman bersama dari semua yang terlibat sebagai bagian dari saran dari nasihat perencanaan pengembangan kualitas (Musrenbang), termasuk masyarakat, untuk mendukung dan mengamankan keberhasilan rencana perencanaan pembangunan lokal.

Relevan dengan hal tersebut, menurut (Bittner & Leimeister, 2013) Pemahaman umum adalah bagian penting dari mencapai kerja sama yang efektif. Keragaman latar belakang aktor atau mitra dalam pelaksanaan program adalah tantangan, dan pada saat yang sama, poin kunci dengan potensi untuk menciptakan divisi atau konflik di antara anggota. Oleh karena itu, merupakan tantangan bagi manajer organisasi untuk menggabungkan pemikiran dan pandangan yang berbeda melalui pemikiran (Merulasi Cerdas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan kelompok dapat digabungkan menjadi fusi intelijen untuk mencapai tujuan dan tujuan bersama. Demikian pula, menurut (Mathieu et al., 2000) pemahaman umum tentang diskusi berbagai masalah dalam pekerjaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik, terutama dalam hal kuantitas dan kualitas.

e. *Intermediate Outcome*

Proses kolaboratif musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung menghasilkan capaian jangka pendek dan hasil dari kolaborasi perencanaan strategis yang ditetapkan. Selanjutnya, aspek penting lainnya dalam *intermediate outcome* adalah perencanaan strategi. Perencanaan memegang peranan penting karena akan menentukan bagaimana langkah-langkah merealisasikan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan stratejik dapat meminimalisir Adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, mengurai permasalahan dan mengatasinya, serta memperkirakan hambatan-hambatan ke depan di dalam penyusunan rencana dan realisasi pembangunan daerah.

Apa yang disampaikan informan menggambarkan bahwa perencanaan stratejik di jangka menengah yaitu dengan melakukan pendekatan anggaran terpadu, pendekatan anggaran kinerja dan pendekatan pengeluaran jangka menengah. Perlunya membentuk tim yang terdiri dari *stakeholder* terkait untuk melakukan proses pengumpulan data dan informasi serta menganalisis kebutuhan dan potensi daerah secara komprehensif. Karena menurut informan, selama ini data terkait daerah kurang begitu *up to date*.

Berdasarkan keterangan informan terkait aspek capaian jangka pendek dan perencanaan stratejik di dalam dimensi *intermediate outcome*, dapat peneliti sampaikan hasil observasi yang menggambarkan terdapat kontradiksi antara harapan yang diinginkan terhadap capaian *intermediate outcome* dengan temuan realitas peneliti di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan harapan sebagian besar informan mengenai tercapainya tujuan maupun sasaran dari adanya *collaborative governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung, di antaranya tercapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penghematan anggaran, penyelarasan visi dan misi pemerintah, kemudahan pengawasan dan evaluasi, tercapai sinergis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Demikian pula pada sisi pengawasan dan evaluasi, yang lebih didominasi pihak eksekutif dan legislatif, namun kontribusi pihak di luar pemerintahan dalam hal ini masyarakat, tim delegasi Musrenbang, akademisi maupun media massa dalam pengawasan dan evaluasi tidak begitu signifikan. Hal ini diidentifikasi peneliti berdasar observasi dan penelusuran bahwasanya pihak di luar pemerintahan pada konsultasi-konsultasi publik tidak signifikan berpartisipasi. Belum ada forum pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintahan dan elemen masyarakat. Hal ini juga sekaligus memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat, serta partisipasi pihak di luar pemerintahan belum meningkat.

Kemudian, dalam aspek perencanaan strategik, observasi dan penelusuran peneliti, tidak menemukan adanya forum-forum yang lebih intens dan substansial terkait perencanaan strategik. Masyarakat dan pihak di luar pemerintahan lebih terlibat secara non-aktif dan formalitas pada Musrenbang di tingkat desa, sementara di tingkat merencanakan berbagai tahapan-tahapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung, termasuk pula nominasi nilai anggaran, masyarakat dan pihak di luar pemerintah begitu terbatas dan tidak leluasa untuk memberikan koreksi.

SIMPULAN

Collaborative governance Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung belum optimal, terlihat dari lemahnya dialog tatap muka, rendahnya rasa saling percaya antar pelaku, kurangnya kepercayaan masyarakat, dan kurangnya pengertian terhadap dinamika kepentingan yang berbeda. *Collaborative governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung didukung oleh adanya aturan dasar berupa regulasi di tingkat pusat dan daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, tersedianya sumber daya manusia yang cukup baik dalam perencanaan pembangunan daerah, dan kepemimpinan fasilitatif Pj. kepala daerah yang cukup proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah belum adanya mekanisme untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dan dinamika kepentingan yang berbeda dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (n.d.-a). *Collaborative governance in theory and practice. Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Ansell, C., & Gash, A. (2007b). Collaborative governance in theory and practice. *Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bittner, E. A. C., & Leimeister, J. M. (2013). *Why shared understanding matters - Engineering a collaboration process for shared understanding to improve collaboration effectiveness in heterogeneous teams*. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/HICSS.2013.608>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (n.d.). *An Integrative Framework for Collaborative Governance: Vol. 22(1)*. Journal of Public Administration Research and Theory. Retrieved April 18, 2025, from <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Febrian, R. A. , I. S. , & S. M. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru: Vol. 2(2)*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi.
- Fukuyama, F. (1995). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems: Vol. 15(3)*. Academy of Management.
- Imperial, M. T. (2005). *Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs: Vol. 37(3)*. Administration and Society. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0095399705276111>
- Karlsen, J. T., Græe, K., & Massaoud, M. J. (2008). *Building trust in project-stakeholder relationships: Vol. 3(1)*. relationships. Baltic Journal of Management. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17465260810844239>
- Mathieu, J. E., Goodwin, G. F., Heffner, T. S., Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (2000). *The influence of shared mental models on team process and performance: Vol. 85(2)*. Journal of Applied Psychology. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.273>
- Newman, R. (2017). *Let's talk talk: Utilising metatalk for the development of productive collaborative dialogues (Vol. 26)*. Thinking Skills and Creativity. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.04.006>
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Shockley-Zalabak, P. S., Morreale, S. P., & Hackman, M. Z. (2010). *Building the High-Trust Organization: Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust*. John Wiley & Sons, Inc.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66, 20–32.